

## **Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pendidikan Di Ibukota Provinsi Papua Tengah**

**Arief Rahman Hakim**

Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

[Ariefhakim95@gmail.com](mailto:Ariefhakim95@gmail.com)

### **Abstract**

*Decentralization gives regions a lot of space to be creative and innovate both politically and administratively. This opportunity was utilized by the city government in Nabire Province to meet the basic needs of its citizens, namely increasing access and quality of public services in the education sector. The local government responded to these demands. This is done through various educational policies and innovative programs, the use of the concept of innovation in the administration of regional government is of course appropriate to the latest developments in public administration theory which places innovation as an effective tool and solution for solving increasingly complex social problems. Empirically, in the world of education, there are phenomena such as poor accessibility, high costs and also low quality of education, causing the low level of education in Nabire's HDI to remain low. This phenomenon is the main reason why local government innovation in the field of education is important. Based on this idea, this research was conducted to answer two problem formulations and clarify the focus of the research, namely: (1) the innovation program development process; (2) a typology of innovation programs was developed. This research used a qualitative approach, data was obtained from interviews, observation and documentation using spiral model data analysis. This research resulted in a process for developing educational innovation programs through (1) a policy process (regulatory function) and a typology of innovative programs, including Children's Education Studio (SPA), Free Education and Education Working Group. The discussion uses research findings, especially theories and concepts that are important for the development of innovation in the public sector, government discoveries as a means of analyzing research findings. Based on the results of this analysis, it can be concluded that there are several things that can be done, namely first, the process of developing educational themed innovation programs is carried out through a political process, namely policy making (regulation) and an administrative/management process, namely policy implementation (management). Theoretically, apart from that, the policy formulation and innovation program implementation process must also be carried out in a carefully innovative manner. The policy-making process of the regional government and DPRD in developing innovation must be carried out democratically, participatively and responsively as well as in the management process. Administration of regional bureaucracy and school units must also be carried out effectively and efficiently and financially. Second, a good typology of government innovation programs comes from internal and external regional government partners which are adopted by an innovation reproduction strategy so that innovation programs in regional government like this do not last forever containing the value of new discoveries (novels), but regional government innovation programs must do the following. This has value in improving public services. Finally, based on the three analysis findings above, research recommendations are made, namely: The development of educational innovation programs must be supported by political processes and also innovation management/management processes, innovation programs can be obtained from internal and external management partners with replication strategies through approval processes, development of local government innovation policies and programs can be effective in the short and long term long term, if supported by innovative capacity which includes innovative management, quality hardware (task force), strong structures and systems and the ability to manage external influences (politics and networks) and planning national innovation policies and programs.*

**Keywords:** Regional Government Innovation; Innovation Typology; Education Problems

## **Abstrak**

Desentralisasi memberi daerah banyak ruang untuk berkreasi dan berinovasi baik secara politis maupun administratif. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemerintah kota di Provinsi Nabire untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan. Pemerintah setempat menanggapi tuntutan tersebut. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan pendidikan dan program inovatif, penggunaan konsep inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu saja tepat perkembangan terkini dalam teori administrasi publik yang menempatkan inovasi sebagai alat dan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah sosial yang semakin kompleks. Secara empiris dalam dunia pendidikan terdapat fenomena seperti buruknya aksesibilitas, biaya yang mahal dan juga mutu pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat Pendidikan IPM Nabire masih rendah. Fenomena ini menjadi alasan utama mengapa hal ini penting inovasi pemerintah daerah di bidang pendidikan. Berdasarkan pemikiran itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah dan memperjelas fokusnya penelitian, yaitu: (1) proses pengembangan program inovasi; (2) tipologi program inovasi dikembangkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data model spiral. Penelitian ini menghasilkan proses pengembangan program inovasi pendidikan melalui (1) proses kebijakan (fungsi regulasi) dan tipologi program inovatif, termasuk Sanggar Pendidikan Anak (SPA), Pendidikan Gratis dan Kelompok Kerja Pendidikan. Pembahasan menggunakan temuan penelitian terutama teori dan konsep yang penting bagi pengembangan inovasi di sektor publik penemuan pemerintah sebagai sarana menganalisis temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kesimpulannya ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu pertama, proses pengembangan program inovasi tema pendidikan dilakukan melalui proses politik yaitu pembuatan kebijakan (regulasi) dan proses administrasi/manajemen, yaitu implementasi kebijakan (manajemen). Secara teoritis, Selain itu, perumusan kebijakan dan proses implementasi program inovasi juga harus dilakukan secara cermat inovatif Proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan DPRD dalam pengembangan inovasi harus dilaksanakan secara demokratis, partisipatif, dan responsif serta dalam proses pengelolannya. Penatausahaan birokrasi daerah dan satuan sekolah juga harus dilakukan secara efektif dan efisien dan keuangan. Kedua, tipologi program inovasi pemerintah yang baik berasal dari mitra mitra internal dan eksternal pemerintah daerah yang diadopsi oleh strategi reproduksi inovasi agar program inovasi pada pemerintahan daerah seperti ini tidak berlangsung selamanya memuat nilai penemuan baru (novel), namun program inovasi pemerintah daerah harus melakukan hal tersebut mempunyai nilai dalam meningkatkan pelayanan publik. Akhirnya berbasis berdasarkan ketiga temuan analisis di atas, maka dibuatlah rekomendasi penelitian, yaitu: Pengembangan program inovasi pendidikan harus didukung oleh proses politik dan juga manajemen inovasi/proses manajemen, program inovasi dapat diperoleh dari mitra manajemen internal dan eksternal dengan strategi replikasi melalui proses persetujuan, pengembangan kebijakan dan program inovasi pemerintah daerah dapat efektif dalam jangka pendek dan jangka panjang, jika didukung oleh kapasitas inovatif yang mencakup manajemen inovatif, kualitas perangkat keras (satuan tugas), struktur dan sistem yang kuat dan kemampuan untuk mengelola pengaruh eksternal (politik dan jaringan) dan perencanaan kebijakan dan program inovasi nasional.

**Kata Kunci:** Inovasi Pemerintahan Daerah; Tipologi Inovasi; Permasalahan Pendidikan

## 1. Pendahuluan

Reformasi regional, memilih model sistem yang terdesentralisasi pemerintahan daerah diperkuat dengan disahkannya tiga undang-undang pemerintahan daerah 15 tahun terakhir. Ketiga undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, ditetapkan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir adalah undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di era otonomi daerah (Abdul Wahab, 2002), daerah otonom (provinsi, kabupaten/kota) memiliki kemampuan penegakan hukum yang semakin luas pemerintah Daerah otonom harus mempunyai keberanian dan kemampuan untuk tampil beda (kemampuan menciptakan perbedaan) dengan bidang lain. Otonomi daerah memberi ruang “kepemimpinan politik” karena daerah mengeluarkan kebijakan otonomnya. di dalam dari sudut pandang administrasi publik, ruang kreativitas dan inovasi yang mendalam sangatlah luas penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut bebas. Kondisi ideal dari sistem pemerintahan daerah Indonesia, baik yang telah ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun menjelaskan ideal secara teori dan konseptual tentang kebijakan desentralisasi, muaranya tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada tingkat lokal. Di beberapa daerah otonom lain pun, praktek inovasi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan banyak dikembangkan. Daerah otonom yang sukses sering kali menjadi rujukan bagi beberapa daerah otonom lainnya. Fenomena Ibukota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire adalah pelajaran yang sangat bernilai, karena pada daerah tersebut, kapasitas pemerintah daerah yang terus melakukan inovasi dengan dukungan masyarakat. Merujuk pada fakta empirik yang dilansir di atas, tampak bahwa pengembangan inovasi pemerintah daerah sudah menunjukkanukti bahwa secara umum berdampak terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Meskipun demikian pengembangan inovasi pemerintahan daerah, tetap memiliki beberapa permasalahan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, konteks penelitian inovasi pemerintahan daerah ini akan dipusatkan pada penyelenggaraan kewenangan mengatur (*policy formulation function*) dan mengurus (*policy implementation function*) urusan pendidikan yang telah dilimpahkan kepada daerah otonom. Kewenangan tersebut di atur pada pasal 12 ayat (1) point (a), (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, n.d.) dan pasal 7 ayat (2) point (a), PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Fokus penelitian tentang inovasi pemerintahan daerah ini ditentukan pada daerah otonom Ibukota Provinsi Papua Tengah. Obyek penelitian berada pada penyelenggaraan kewenangan fungsi mengatur (*policy formulation function*) oleh DPRD dan Kepala Daerah dan kewenangan fungsi mengurus (*policy implementation function*) dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (birokrasi daerah otonom). Dalam pelaksanaan fungsi mengurus mengenai urusan pendidikan ini, perangkat daerah yang terkait adalah Dinas Pendidikan dan UPT penyelenggara urusan pendidikan dalam lingkup pemerintahan Ibukota Provinsi Papua Tengah. Ibukota Provinsi Papua Tengah terdiri dari 15 Distrik : (1) Distrik Nabire, (2) Distrik Makimi, (3) Distrik Nabire Barat, (4) Distrik Teluk Kimi, (5) Distrik Wangar, (6) Distrik Uwapa, (7) Distrik Yaro, (8) Distrik Napan, (9) Distrik Siriwo, (10) Distrik Teluk Umar, (11) Distrik Wapoga, (12) Distrik Yaur, (13) Distrik Mora, (14) Distrik Dipa, dan (15) Distrik Menouw (Nabire, n.d.).

Fenomena dunia pendidikan di Provinsi Nabire menjadi permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah, maka penting untuk menerapkan program inovatif yang mengatasi tiga permasalahan utama, yaitu (1) rendahnya aksesibilitas layanan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat; (2) baik guru maupun guru tidak mengajar melayani; dan (3) rendahnya kualitas pendidikan, khususnya terkait dengan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Kegou, 2020).

Tiga permasalahan utama yang disebutkan di atas adalah rendahnya aksesibilitas, tingginya biaya pendidikan dan kualitas pembelajaran yang masih rendah mempengaruhi beberapa hal, yaitu:

Pertama, angka buta aksara (aba) yang tinggi di Provinsi Nabire dengan luas wilayah 12.075,00 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 111.545 jiwa (2017) termasuk kabupaten dibawahnya sebanyak 10% warganya buta huruf atau 7,07% (7.876 jiwa) dari total penduduk Papua yang berjumlah 629.578 jiwa. Provinsi Nabire menunjukkan tren penurunan angka di Papua (Johanis Manuel Ramandey, 2022).

Kedua, indeks pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah dari aspek layanan dasar, Provinsi Papua Tengah akan beranjak dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) delapan kabupaten yang masih sangat rendah, yaitu, IPM Nabire 69,15; IPM Dogiyai 55; IPM Deiyai 49,96; IPM Paniai 56,07; IPM Intan Jaya 48,99; IPM Puncak Jaya 48,34, IPM Puncak 43, 17; dan IPM Mimika 74,47. IPM menurut standar United Nations Development Program (UNDP), adalah IPM >80 sangat tinggi, IPM 70-79 tinggi, dan IPM 60-69 sedang. Berdasarkan standar ini, hanya Kabupaten Mimika berada di kategori tinggi dan Nabire mengikutinya. IPM adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan sehat (angka harapan hidup, indeks kesehatan); (2) Pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan); (3) Kehidupan yang layak (PNB, indeks pengeluaran) (*Papua Tengah, IPM & Pembinaan Ibu Kota*, 2022).

Berdasarkan perspektif birokrasi pemerintahan yang dikembangkan oleh Wilson et Pandangan Bromley mengenai kemajuan kebijakan yang diikuti dengan inovasi dalam implementasi masalah pendidikan, baik di tingkat politik maupun di tingkat manajemen, dan inovasi di tingkat. Semua tingkat operasional melibatkan pelaksanaan kekuasaan mengatur (mengembangkan kebijakan) dan mengelola (menerapkan kebijakan) masalah pendidikan di Nabire. Selain penelitian mengenai inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan, kita bisa melihat dari birokrasi pemerintahan, juga akan dikaji dari sudut pandang jenis dan tingkat pengembangan inovasi. Hal ini juga mencakup tingkat kapasitas inovasi yang diselenggarakan Pemprov Nabire untuk mendorong mencapai inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan pendidikan yang efektif.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Desentralisasi dan Pemerintah Daerah**

Menurut Bank Dunia (Wasistiono, 2010) dari dua puluh mitra kerja desentralisasi, Indonesia adalah salah satu negaranya pelaksanaan “dentuman besar desentralisasi” atau “*big bang of desentralization*”. Tertulis di sana menimbulkan ledakan besar atau bahkan revolusi desentralisasi karena hal tersebut bersifat transfer kekuasaan dan tanggung jawab publik dari pemerintah pusat hingga daerah dimensi yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada ruang lingkup urusan pemerintahan daerah otonom dalam undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti melalui PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teoritis dan empiris, setiap organisasi, termasuk negara, selalu mengikuti prinsip fokus sejak lahir hingga akhir kehidupan. Tapi organisasi besar dan sangat sulit dan tidak mungkin diselenggarakan hanya berdasarkan prinsip sentralisasi. Jika hanya dengan mengikuti prinsip ini, dapat dipastikan bahwa organisasi menjalankan berbagai fungsi itu tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu prinsip desentralisasi juga diperlukan.

### **a. Manajemen Pemerintah Daerah**

Pemahaman terhadap berbagai permasalahan pemerintahan daerah sangatlah penting dalam pendalaman inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Watson, 2003) menyunting sebuah buku berjudul *“Local Government Management: Current Issues and Best Practices”*. Dalam buku ini, Watson dan Hasset menyajikan berbagai tulisan oleh banyak pakar administrasi publik. Berbagai tulisan tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori bagian yang penting untuk dipahami selama implementasi pemerintah lokal. Beberapa aspek yang dimaksud adalah: (1) hubungan antar pejabat terpilih dan staf profesional; (2) manajemen keuangan dan anggaran (penganggaran dan pengelolaan keuangan); (3) manajemen pejabat (manajemen personel publik); (4) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih produktif dan responsif (pemerintah daerah lebih produktif dan responsif); dan (5) partisipasi warga pemerintahan daerah (partisipasi warga dalam partisipasi).

(Stewart, 1995) juga menjelaskan adanya kondisi dan tugas tertentu perlu dipahami ciri-ciri kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah Artinya pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai daerah (regional) yang menunjukkan nama dan identitasnya, bidang di mana ia melaksanakan tugasnya secara efektif untuk fokus, bidang ini menawarkan batasan terhadap efektivitas dan efisiensi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dengan lingkungan eksternal saat menjalankan tugas dalam organisasi terbuka sehingga kontrolnya multi-kontak. Tugas utama pemerintah daerah adalah menjalankan kekuasaan administrasi publik, sehingga harus mempunyai tanggung jawab yang biasanya dievaluasi beberapa prosedur disebut pemilihan. Tugas dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah hukum (law) dan kebijaksanaan. Dalam kegiatannya sebagai penyedia jasa pelayanan publik, pemerintah kota tidak hanya memerlukan prinsip ekonomis, efektif dan efisien (3E), namun prinsip keadilan dan pemerataan juga harus diperhatikan.

### **b. Birokrasi Pemerinta Daerah**

Memahami keberadaan birokrasi dalam pemerintahan daerah yang dapat dilihat dari berbagai sisi sudut pandang dan pendekatan. Untuk memahami keberadaan birokrasi pemerintahan daerah ini nampaknya penting mengingat posisi dan peran birokrasi sangat penting dan strategis pelaksanaan pemerintahan daerah. Termasuk dorongan pemaksaan pemerintah daerah yang inovatif. Oleh karena itu, ada beberapa yang disajikan pada bagian ini perspektif dan pendekatan para pemikir administrasi publik dalam memahami birokrasi pemerintahan daerah. Selain itu, ia juga tampil istilah birokrasi pemerintahan daerah sering digunakan dalam sistem administrasi daerah Indonesia yaitu perangkat daerah.

Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi muncul, para ahli manajemen Masyarakat beranggapan bahwa pada umumnya ada dua aliran pemikiran utama (Setiono, 2022). Dua gagasan umum tentang keberadaan birokrasi adalah, pertama, birokrasi dilahirkan untuk menjadi alat kekuasaan. Arus utama pertama inilah yang harus dimiliki oleh seorang penguasa yang kuat dilayani oleh hamba-hamba (perangkat keras) yang cerdas dan dapat diandalkan (setia). Konsep pemikiran ini menunjukkan bahwa jika Anda ingin kekuatan Anda efektif, Anda harus melakukannya mereka memiliki perangkat yang kokoh, kuat, profesional, dan tahan lama. Birokrasi terdiri dari sarana bagi penguasa untuk mewujudkan kekuasaan dan kepentingannya untuk mengatur masyarakat.

## 2.2 Kajian Inovasi Daerah

Kajian terhadap inovasi pemerintah, khususnya terkait dengan isu-isu pemerintahan di tingkat lokal (local issue), dapat ditemukan dalam salah satu karya Watson (1999) yang berjudul *“Innovative Government: Creative Approach to Local Problems.”* Dalam karyanya, (Watson, 1999:130) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai alasan khusus untuk mengembangkan kapasitas inovasinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Watson sebagai berikut:

“.....Local governments have a unique opportunity to be innovative for several reasons. One is that local governments are very close to the problems in their communities. ...., local officials have the chance to see and hear the problems as they develop. A second reason local governments can be innovative is that there are so many of them doing basically the same things. Each community serves as a laboratory for innovation. ...., local governments to solve problems and develop solutions in different ways. A third reason is that most elected officials on the local level run for office because they care about their communities and believe that they can improve them. The last reason is that the level of competence and expertise found among local public administrators has greatly increased over the past several decades. Local public administrators are better trained than they have ever been and are anxious to work for organizations that allow them to use their talents.” (1999:130-131).

Relevansi pentingnya inovasi yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah terlihat dari kedekatan unit organisasi pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga dianggap mengetahui secara pasti permasalahan di tingkat daerah. Demikian pula permasalahan yang dihadapi masyarakat jelas berbeda-beda sehingga perlu diselesaikan dengan cara yang berbeda.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2015), metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan pada kondisi alam (*natural setting*). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pustaka, literatur, jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian. Selain itu analisis dan kemudian diambil kesimpulan dari temuan penelitian.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah

Setelah memahami secara umum proses administrasi pemerintahan daerah di Ibukota Provinsi Papua Tengah, bagian tersebut menjelaskan dengan tepat bagaimana proses berjalan urusan pendidikan saat ini sedang dilaksanakan. Proses manajemen urusan pendidikan mengacu pada kinerja tugas mengatur dan mengelola sesuatu Pendidikan di Nabire mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan urusan Pendidikan pemerintah daerah menerapkan PP no. 38 Tahun 2007 Pembagian urusan administrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah tersebut dituangkan dalam peraturan Kabupaten Nabire No. 10/2010 tentang pembentukan subbagian Nabaru Permai, Kali Susu dan Kali Harapan di Kecamatan Nabire, Subbagian Samabusa di Kecamatan Teluk Kimi, Subbagian Bumi Raya di Kabupaten Nabire Barat dan Subbagian Marga Jaya di Kabupaten Kecamatan Uwapa Kabupaten Nabire. Kaitannya dengan pengertian proses penyelenggaraan urusan pendidikan.

Jadi bagian selanjutnya menjelaskan aspek-aspek menjalankan urusan pendidikan, yaitu: (1) pemisahan kekuasaan dalam bidang pendidikan; (2) penyelenggara urusan pendidikan; (3) program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk permasalahan pelatihan; dan (3) unit pengajaran. Setelah itu juga diberikan beberapa informasi dan informasi yang diperoleh dari wawancara peneliti, informasi yang berkaitan dengan informan untuk fokus pada proses pengembangan program reformasi pendidikan di Nabire. Pada bagian selanjutnya, aspek-aspek tersebut diuraikan

berdasarkan uraian hasil dokumentasi dan observasi lapangan.

#### **a. Manajemen Pemerintah Daerah**

Mengenai pembagian kekuasaan di bidang pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan secara jelas dan rinci pada bagian Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Dimana distribusinya kewenangan sektor pendidikan dijelaskan secara jelas dan rinci oleh sub-departemen berwibawa Keahlian pendidikan dibagi menjadi 6 (enam) subsektor lembaga yaitu: (a) kebijakan, (b) pendanaan, (c) kurikulum, (d) sarana dan prasarana, (e) pendidik dan staf pelatihan dan f) pengendalian mutu pelatihan. Secara teori, hal ini umumnya dipahami dalam administrasi bisnis pimpinan daerah dan DPRD sebagai pejabat politik yang dipilih secara demokratis melalui proses seleksi. Sebagai pejabat politik, dia punya kekuasaan melaksanakan tugas regulasi (pembuatan kebijakan), yaitu menetapkan inovasi regulasi peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai keinginan dan kebutuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah pimpinan daerah dan badan daerah (lokal birokrasi) ditunjuk sebagai pejabat yang melaksanakan inovasi fungsi administratif administrasi publik (implementasi kebijakan). profesional, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya (Supriyono, 2011).

Selain itu, Perangkat menerapkan praktik inovatif tertentu sebuah distrik (birokrasi lokal) berada di bawah pengawasan seorang Direktur Distrik dan Sekretaris Distrik. Di dalam hal ini membutuhkan semangat inovatif dari berbagai pabrik mesin daerah mengatur urusan negara, pembangunan, dan pelayanan umum. Birokrasi Inovasi ditandai dengan kreativitas, keterampilan dan profesionalisme melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Implementasi kebijakan yang inovatif dapat terwujud jika mengedepankan kreativitas, efisiensi dan nilai efisiensi atau nilai-nilai manajemen. Efisiensi tersebut terkandung dalam hal mengelola keuangan dan memberikan insentif.

#### **4.2 Tipologi Program Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan**

Dalam RPJM 2016-2021 tercantum visi daerah Provinsi Nabire yakni “Membuka Isolasi Daerah Demi Terwujudnya Masyarakat Nabire yang Berwawasan Keberagaman, Berkeadilan, Sejahtera, dan Mandiri secara berkelanjutan”. Salah satu misi untuk menuju tercapainya visi tersebut adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berilmu, berbudaya, dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan rumusan visi dan misi tersebut adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itulah, maka pemerintah daerah Provinsi Nabire menyadari bahwa salah satu aspek pembangunan yang harus diprioritaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatkan capaian IPM adalah fokus pada pelayanan publik dibidang pendidikan atau penyelenggaraan urusan Pendidikan.

Secara teoritis, pada dasarnya terdapat banyak sumber inovasi dalam organisasi pemerintah. Menurut (Eggers, William D. & Singh, 2009), pengumpulan sumber inovasi di organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dapat dipertimbangkan melalui empat sumbu, yaitu (1) kemitraan internal, khususnya inovasi melalui inovasi pemerintah. organisasi dari dalam (*reinvented*).pemerintah); (2) pegawai pemerintah (*employees*), khususnya inovasi melalui kolaborasi berbasis dampak; (3) mitra eksternal, termasuk inovasi melalui kemitraan dan jaringan pemerintah; dan (4) inovasi dapat berasal dari masyarakat, yaitu inovasi pemerintah muncul karena pemerintah sangat tanggap dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah.

Program inovatif yang dilaksanakan provinsi Nabire adalah (1) pengembangan sarana pendidikan anak (SPA); (2) Program pendidikan gratis, khususnya gratis biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMA (12 tahun); dan (3) Satgas Pendidikan. Ketiga program inovatif ini mungkin bukan lagi sesuatu yang baru dan dianggap sebagai program rutin. Anggapan bahwa program inovasi merupakan program reguler dapat dianggap beralasan mengingat implementasinya telah berlangsung selama beberapa tahun. Semua program inovasi pendidikan tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Jika mengacu pada pandangan (Rogers, 2003) tersebut, maka dapat dipahami bahwa program inovasi urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Nabire sejalan dengan

pandangan yang mengatakan bahwa inovasi berkaitan dengan ide yang baru, praktek dan obyek yang masih baru terutama bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan dari berbagai di atas, maka terdapat beberapa point penting yang dapat dijadikan kesimpulan dari penelitian, yaitu:

1. Proses pengembangan program inovasi pendidikan oleh pemerintah daerah dapat dilihat baik dari sudut pandang politik, yaitu proses perumusan kebijakan (peraturan), maupun dari sudut pandang manajemen atau administratif, yaitu mengetahui proses pelaksanaan (manajemen).
  - a. Proses kebijakan adalah proses perumusan kebijakan atau fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan DPRD. Proses perumusan kebijakan mengenai program inovatif ini murni inisiatif pemerintah daerah (Bupati) dan selanjutnya dibahas dengan DPRD (Komite Bidang Pendidikan).
  - b. Aspek pengembangan program inovasi berkaitan dengan proses manajemen atau operasional. Proses tersebut merupakan tahap pelaksanaan kebijakan (Perda) atau fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Bupati) Nabire yang didukung dengan Peraturan Daerah (birokrasi daerah). Kenyataannya, pengembangan seluruh program inovasi pendidikan, baik dari sisi manajemen maupun proses operasional, seluruhnya dilakukan oleh struktur birokrasi terkait Dispora dan UPTD. Kemudian secara teknis proses pengembangan operasional dilakukan oleh Unit Sekolah dengan melibatkan pihak ketiga, khususnya masyarakat dan konsultan mitra (swasta) dalam program inovasi tertentu.
2. Tipologi program inovasi dalam urusan Pendidikan dapat diuraikan bahwa:
  - a. Ada tiga jenis program inovasi pendidikan di Nabire yang ditemukan dan dijadikan objek penelitian, yaitu Sanggar Pendidikan Anak (SPA), Satgas Pendidikan dan Pendidikan Gratis.
  - b. Ketiga program inovasi ini merupakan hasil riset komparatif pemerintah daerah dan diterapkan dengan strategi mereplikasi (meniru) program serupa di daerah lain dengan tetap mempertimbangkan karakteristik permintaan di lingkungan lokal Nabire. Program inovasi pendidikan seperti ini telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan (sekolah) dan kualitas pembelajaran pun meningkat, terbukti dengan menurunnya Angka Buta Aksara (ABA) dan meningkatnya pendidikan. Sehingga indeks pembangunan manusia di Nabire juga semakin meningkat.

## Daftar Pustaka

- [1] Abdul Wahab, S. (2002). *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*. Surabaya: SIC.
- [2] Eggers, William D. & Singh, S. K. (2009). *The Public Innovator's playbook: Nurturing bold ideas in government*.
- [3] Johanis Manuel Ramandey, A. W. (2022). Dengan Pemberantasan Buta Aksara Meningkatkan Pengetahuan Warga Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Papua. *Jurnal Wiyata Cederawasih, 1, No.1*.
- [4] Kegou, S. (2020). *Masalah Utama di Nabire adalah Masalah Pendidikan*. Nabire.Net. <https://www.nabire.net/masalah-utama-di-nabire-adalah-masalah-pendidikan/>
- [5] Nabire, P. (n.d.). *Kota Nabire*. Nabire.Net. <https://www.nabire.net/tentang-nabire/>
- [6] *Papua Tengah, IPM & Pembinaan Ibu Kota*. (2022). Nabirekab.Go.Id. <https://nabirekab.go.id/portal/2022/11/papua-tengah-ipm-pembinaan-ibu-kota/>
- [7] Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovation*. Free Press.
- [8] Setiono, B. (2022). *Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi*. Bekasi: Gugus Press.
- [9] Stewart, J. (1995). *Understanding the Management of Local Government: Its Special Purpose, Conditions and Task*. Longman Group UK Ltd.
- [10] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- [11] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- [12] Wasistiono, S. (2010). Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan. *Jurnal Ilmu Politik, Jakarta: AIPI, No.21*, 40–52.
- [13] Watson, D. J. & W. L. H. (2003). *Local Government Management: Current Issues and Best Practices*. M.E. Sharpe.